

MEMBANGUN LITERASI PANCASILA UNTUK PENDIDIKAN INDONESIA YANG BERKARAKTER

Beny Dwi Lukitoaji

Program Studi PGSD FKIP Universitas PGRI Yogyakarta

(beny@upy.ac.id)

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang literasi Pancasila untuk pendidikan Indonesia yang berkarakter. Setiap negara yang ada di dunia pasti memiliki cita-cita ataupun pandangan hidup yang berbeda. Begitu juga dengan Indonesia yang telah sepakat melalui konsensus atas nama bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi dari bangsa Indonesia. Namun ketika melihat kondisi saat ini di Indonesia, Pancasila seolah-olah hilang dan hanya berfungsi sekedar simbol yang ditempelkan di dinding ruangan, dibacakan saat upacara. Tentu saja hal ini menjadikan kekhawatiran tersendiri terhadap perilaku pada masyarakat ketika Pancasila sudah tidak lagi menjadi pedoman hidup. Oleh karena itu salah satu cara yang bisa dilakukan agar masyarakat kembali berpegang teguh kepada Pancasila adalah dengan gerakan literasi Pancasila. Gerakan literasi Pancasila merupakan upaya kembali membumikan Pancasila. Sebagai upaya untuk membangun literasi Pancasila adalah dengan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, membangun kepribadian Pancasila, sosialisasi dan kebudayaan Pancasila. Upaya tersebut bisa dilakukan melalui pendidikan dengan mengajarkan Pancasila kepada generasi ke generasi selanjutnya, dengan harapan agar generasi yang akan datang tetap mengenal ideologi Pancasila. Untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart and good citizen*) setidaknya mampu memegang teguh Pancasila dalam kehidupan, dengan didukung pengalaman belajar yang diperoleh dari proses pembelajaran.

Kata Kunci: *Literasi Pancasila, Pendidikan Indonesia yang berkarakter*

A. PENDAHULUAN

Setiap negara pasti memiliki pandangan hidup atau cita-cita negara yang ingin dicapai, karena masing-masing negara pasti memiliki latar belakang, pandangan, cita-cita yang berbeda. Begitu juga dengan Indonesia yang memiliki pandangan hidup yang berbeda dengan negara lain. Pandangan hidup itu adalah Pancasila yang menjadi pedoman setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berasal dari bangsa Indonesia, digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu kemudian dikristalisasi menjadi ideologi bangsa Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaelan (2016: 4) setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup, serta pandangan hidup agar tidak terombang ambing dalam kancah pergaulan Internasional. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya Pancasila semua kehidupan baik sehari-hari maupun penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila serta Indonesia memiliki jati diri yang khas.

Namun ketika melihat realita sekarang Pancasila hanya sekedar menjadi simbol belaka, hanya diucapkan ketika upacara, hanya ditempelkan di dinding sehingga terlihat Pancasila hanya diam dan terpaku. Padahal jika kita menengok kembali bagaimana proses lahirnya Pancasila, banyak pengorbanan dari para *founding father* untuk negeri kita. Seharusnya kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa merealisasikan Pancasila secara baik. Sebagaimana diketahui realisasi Pancasila ada dua, yaitu secara subjektif dan objektif, secara subjektif berarti realisasi Pancasila secara individu atau perorangan, sedangkan objektif berarti realisasi Pancasila di dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat dari Kaelan (2016: 128 dan 131) yang menyatakan bahwa realisasi Pancasila secara objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan

perundang-undangan negara Indonesia. Sedangkan realisasi Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia.

Banyak kasus-kasus di negara ini yang tidak sesuai dengan realisasi Pancasila, diantaranya hukum yang tidak adil, korupsi yang merajalela, bom bali, bom bunuh diri, pelanggaran HAM, dan tentunya kasus-kasus tersebut menyita perhatian dari publik. Jadi bisa dilihat ternyata realisasi Pancasila baik subjektif maupun objektif tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, tingkat perbuatan merusak diri pada generasi muda juga sangat memprihatinkan, antara lain tawuran antar pelajar, seks bebas, narkoba, kekerasan, pencurian, pembunuhan. Dari beberapa permasalahan tersebut memang bisa dilihat terletak kepada perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlu adanya peran dari semua kalangan yang ada di negara ini untuk kembali kepada Pancasila sebagai ideologi dan pandangan bangsa Indonesia.

Mahatma Ghandi dalam Soedarsono (2010) mengemukakan tujuh dosa yang mematikan yaitu: (1) semakin merebaknya nilai-nilai dan perilaku memperoleh kekayaan tanpa bekerja, (2) kesenangan tanpa hati nurani, (3) pengetahuan tanpa karakter, (4) bisnis tanpa moralitas, (5) ilmu pengetahuan tanpa kemauan, (6) agama tanpa pengorbanan, (7) politik tanpa prinsip. Selain itu Lickona dalam Megawangi (2004: 7-8) ada sepuluh tanda-tanda jaman yang harus diwaspadai karena jika tanda-tanda ini sudah ada, maka itu berarti bahwa sebuah bangsa sedang menuju kehancuran. Tanda-tanda yang dimaksud adalah: (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, (3) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (6) menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (8) rendahnya rasa

tanggung jawab individu dan warga negara, (9) membudayakan ketidakjujuran, (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. Jika tanda-tanda tersebut sudah ada maka dapat dikatakan akan hancur bangsa Indonesia. Sebagai tindakan representatif maka diperlukan sebuah pemahaman terhadap Pancasila agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan eksistensinya di pergaulan Internasional.

Rendahnya pemahaman terhadap Pancasila membuat bangsa Indonesia seperti kehilangan arah dan tujuan dalam membawa negara ini. Apalagi di era globalisasi ini membuat batas negara menjadi kabur, semakin banyak ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk memperkokoh negara Indonesia, maka semua bangsa harus bersatu tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi maupun TNI untuk mengamankan NKRI. Melalui budaya literasi Pancasila bangsa Indonesia bisa memperdalam pengetahuannya tentang Pancasila, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang baik dan pada akhirnya akan menjadi sebuah perilaku atau *action* yang sesuai dengan nilai Pancasila. Tidak hanya melalui literasi, Pancasila juga diajarkan melalui pendidikan kepada generasi muda sebagai upaya untuk melestarikan Pancasila.

Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena melalui pendidikan manusia memperoleh ilmu yang bermanfaat. Indonesia dalam konteks pendidikan, telah menyelenggarakan dengan berbagai usaha agar warga negara memperoleh pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU RI No 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pengertian pendidikan dapat dilihat

bahwa sebagian besar tujuannya adalah membekali peserta didik dengan karakter yang baik, sehingga pendidikan di Indonesia tidak hanya menekankan pada aspek kependaian belaka namun juga pada aspek karakter. Jadi sangat tepat ketika literasi Pancasila diajarkan di dalam proses pembelajaran karena mendukung tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu membekali peserta didik menjadi lulusan yang cerdas dan berkarakter.

B. PEMBAHASAN

1. Literasi Pancasila

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai literasi Pancasila, maka akan dijabarkan lebih lanjut mengenai literasi agar memudahkan dalam pemahaman. Menurut IndonesiaStudent.com yang merujuk dari (UNESCO, 2015) memberikan definisi literasi adalah secara etimologi berasal dari bahasa Latin *Littera* yang memiliki pengertian melibatkan sistem tulisan yang menyertainya. Literasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan pondasi untuk belajar sepanjang hayat. Hal ini penting sepenuhnya untuk pembangunan sosial dan manusia dalam kemampuannya untuk mengubah kehidupan. Pendapat berikutnya masih terkait dengan literasi menurut Alberta (2009) dalam IndonesiaStudent.com mengatakan bahwa literasi bukan hanya sekedar kemampuan untuk membaca dan menulis namun menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan Pancasila secara etimologi berasal dari Sansekerta dari Hindia (bahasa Brahmana). Menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sansekerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu "*panca*" artinya "lima" "*syila*" vokal i pendek artinya "batu sendi", "alas",

atau “dasar”, “syila” vokal i panjang artinya “peraturan ningkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moraalitas. Oleh karena itu secara etimologis kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Panca Syila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi lima atau secara harfiah dasar yang memiliki lima unsur. Adapun istilah Panca Syila dengan huruf Dewanagari i bermakna lima aturan tingkah laku yang penting (Ymin, 1960: 437 dalam Kaelan, 2016: 12).

Literasi Pancasila merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Apandi (2016) untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan sebuah gerakan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui gerakan literasi Pancasila. Gerakan literasi Pancasila diartikan sebagai sebuah gerakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sehingga masyarakat dapat menghayati, mengamalkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain gerakan literasi Pancasila adalah sebuah gerakan untuk membumikan kembali Pancasila.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diketahui masyarakat sekarang memerlukan gerakan literasi Pancasila sebagai upaya untuk membangun dan membumikan kembali Pancasila. Mengingat era sekarang sudah tidak ada lagi *crush program* dari pemerintah sehingga menyebabkan nilai-nilai Pancasila itu semakin luntur dan dilupakan. Apandi (2016) menyebutkan beragam cara yang dapat dilakukan sebagai sarana gerakan literasi Pancasila, antara lain seminar, lokakarya, diskusi, sosialisasi, lomba menulis yang bertema tentang Pancasila, festival Pancasila, pentas seni

dan budaya, memutar film sejarah perjuangan bangsa, pembuatan film-film pendek, mengangkat kisah-kisah inspiratif orang-orang pelopor, dan pelestari nilai-nilai Pancasila, ziarah ke makam-makam pejuang kemerdekaan, berkunjung ke museum, iklan-iklan atau kampanye di media massa.

2. Pendidikan Indonesia yang berkarakter

Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena melalui pendidikan manusia memperoleh ilmu yang bermanfaat. Indonesia dalam konteks pendidikan, telah menyelenggarakan dengan berbagai usaha agar warga negara memperoleh pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU RI No 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting untuk kemajuan bangsa, seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV yang menegaskan salah satu tugas negara “. mencerdaskan kehidupan bangsa “, kemudian Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”. Selanjutnya Pasal 31 ayat 2 UUD NRI 1945, menyebutkan “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya dapat diketahui bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, karena hak tersebut dijamin oleh pemerintah melalui UUD NRI 1945. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan mengena kepada setiap warga negara perlu di usahakan oleh pemerintah. Untuk menjamin pendidikan nasional di Indonesia pemerintah mengundang UU RI No 2/1989 tentang sistem pendidikan nasional, yang kemudian disempurnakan dengan diundangkannya UU RI No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional” (Dariyo, 2013: 43).

Pendidikan nasional ialah pendidikan yang diselenggarakan dalam skala nasional, sehingga pendidikan tersebut berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman (UU RI No 20 Tahun 2003 pasal 1, ayat 2-3 tentang sistem pendidikan nasional). Sehingga dapat diketahui orientasi pendidikan di Indonesia selain membentuk pengetahuan peserta didik, juga ditanamkan jiwa Pancasila, patuh dan taat terhadap hukum, religius, bangga terhadap budaya bangsa dan bersikap terbuka pada perubahan zaman.

Terdapat beberapa satuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal ialah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal ialah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Dariyo, 2013: 44).

Permasalahan yang sekarang dihadapi oleh pendidikan adalah pembelajaran yang diharapkan mampu memberikan dampak instruksional dan dampak pengiring bagi siswa serta mahasiswa ternyata lebih pada penekanan dampak instruksional saja, atau dalam artian hanya kognitif dan pengetahuan yang diperhatikan. Sedangkan dampak pengiring kurang mendapat perhatian, sehingga siswa dan mahasiswa hanya aspek kognitif saja yang dilatih, untuk aspek lain seperti psikomotor dan afektif dapat dikatakan terabaikan. Hal tersebut berdampak tidak adanya pengalaman belajar yang bermakna. Hal tersebut sejalan dengan Staf Ahli Mendiknas (2007) dalam Winarno (2012: 52-53) yang menyebutkan bahwa pada umumnya kegiatan pembelajaran masih bersifat konvensional atau masih berpusat pada guru (*teacher centered*), kurang mendorong siswa mengembangkan potensi, dan cenderung lebih menekankan pada penyampaian materi.

Selain itu aspek moral sangat berkaitan dengan kemajuan bangsa seperti yang diungkapkan oleh Lickona dalam Megawangi (2004: 7-8) ada sepuluh tanda-tanda jaman yang harus diwaspadai karena jika tanda-tanda ini sudah ada, maka itu berarti bahwa sebuah bangsa sedang menuju kehancuran. Tanda-tanda yang dimaksud adalah: (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, (3) pengaruh peer group yang kuat dalam tindak kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (6) menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (9) membudayakan ketidakjujuran, (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

3. Literasi Pancasila untuk Pendidikan Indonesia yang berkarakter

Pendidikan di Indonesia bertujuan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas saja tetapi juga berkarakter. Oleh karena itu literasi Pancasila perlu diajarkan melalui pendidikan agar generasi muda mempunyai pemahaman terhadap Pancasila. Agar literasi Pancasila bisa berhasil maka setiap individu perlu melakukan realisasi Pancasila secara subjektif dengan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan membudayakan Pancasila. Menurut Kaelan (2016: 131) mengemukakan internalisasi Pancasila perlu dilakukan secara berangsur-angsur dengan cara sebagai berikut:

a. Pengetahuan

Suatu pengetahuan yang benar tentang Pancasila, baik aspek nilai, norma maupun aspek praksisnya. Hal ini harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan individu. Dalam proses transformasi pengetahuan ini diperlukan waktu yang cukup dan berkesinambungan, sehingga pengetahuan ini benar-benar dapat tertanam dalam setiap individu. Tanpa pendidikan yang cukup maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang ideologi bangsa dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat-tingkat yang sangat pragmatis, dan hal ini sangat berbahaya terhadap ketahanan ideologi generasi penerus bangsa.

b. Kesadaran

Selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri

c. Ketaatan

Selalu dalam keadaan kesiapan untuk memenuhi wajib lahir dan batin, lahir berasal dari luar misalnya pemerintah, adapun batin dari diri sendiri.

d. Kemampuan kehendak

Cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan, berdasar nilai-nilai Pancasila

e. Watak dan hati nurani

Agar seseorang selalu mawas diri yaitu:

- 1) Dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan Pancasila dan memberi sanksi batin yang berwujud evaluasi kepada diri sendiri, atau sebelum melakukan perbuatan membuat pedoman Pancasila berupa perintah, larangan, anjuran atau membiarkan untuk berbuat atau tidak berbuat yang ditaatinya sendiri juga. Apabila tidak mentaati maka akan mendapat sanksi batin berupa celaan terhadap diri sendiri.
- 2) Apabila telah melaksanakan maka akan diperoleh suatu kesiapan pribadi untuk mengaktualisasikan Pancasila, yang selanjutnya akan merupakan suatu keyakinan tentang kebenaran.
- 3) Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi yang berdasarkan keyakinan atas kebenaran Pancasila, sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan, untuk memelihara, mengembangkan, mengmalkan, mewariskan, merealisasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan.
- 4) Jika setiap orang Indonesia telah memiliki kondisi yang demikian keadaannya maka setiap orang Indonesia akan berkepribadian berwatak dan berhati nurani Pancasila sehingga akan terjelmalah negara dan masyarakat yang Pancasila.

f. Strategi dan Metode

Proses internalisasi harus diikuti dengan strategi serta metode yang relevan dan memadai. Hal ini berdasarkan realitas objeknya, bahwa subjek dan objek internalisasi dan aktualisasi itu adalah manusia dan dalam lingkungan masyarakat, bangsa, negara. Internalisasi tidak hanya dalam suatu pendidikan formal saja, melainkan juga lingkungan informal, nonformal, maupun lingkungan masyarakat lainnya.

Setelah setiap warga negara mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri sendiri, maka secara otomatis sikapnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan sesuai dengan Pancasila. Sebagaimana diungkapkan di atas, dalam melakukan internalisasi diperlukan strategi dan metode. Strategi dan metode tersebut harus sesuai dengan Pancasila, tidak hanya di pendidikan formal saja tetapi di semua jalur pendidikan.

Agar terjadi konsistensi terhadap proses internalisasi Pancasila sebagai proses warga negara dalam literasi Pancasila, maka diperlukan usaha yang secara konsisten dan berkesinambungan agar menjadi sebuah pembiasaan atau *habituaasi* dalam diri setiap warga negara. Menurut Kaelan (2016: 133-134) ada beberapa tahapan dalam pembentukan kepribadian Pancasila, antara lain:

- a. Proses penghayatan diawal dengan memiliki tentang pengetahuan yang lengkap, jelas tentang kebaikan dan kebenaran Pancasila. Kemudian diserap dan dihayati sehingga menjadi suatu kesadaran yaitu orang selalu dalam keadaan mengetahui diri sendiri, memahami, serta memiliki pengetahuan Pancasila
- b. Kemudian ditingkatkan ke dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan, yaitu suatu kesediaan yang harus senantiasa ada untuk merealisasikan Pancasila
- c. Kemudian disusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan
- d. Kemudian ditingkatkan menjadi mentalitas, yaitu selalu terselenggaranya kesatuan lahir batin, kesatuan akal, rasa, kehendak sikap, dan perbuatan, mentalitas.

Berdasarkan tingkatan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diketahui pengetahuan tentang Pancasila menjadi pokok yang mendasar. Karena seorang warga negara kalau belum yakin akan kebaikan dan kebenaran dari Pancasila,

mustahil bisa melanjutkan hingga tingkatan mentalitas. Kondisi pada saat ini adalah, banyak generasi muda yang tidak meningkatkan pengetahuannya terhadap Pancasila sehingga terjadilah mental yang tidak sesuai dengan Pancasila dan cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang. Ketika warga negara sudah mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila maka terwujudlah kepribadian yang sesuai dengan Pancasila, sehingga terjadilah sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Kaelan (2016: 137-138) mengemukakan ada beberapa cara dalam sosialisasi dan pembudayaan Pancasila, antara lain:

a. Pembudayaan Pancasila pada Kehidupan Sosial

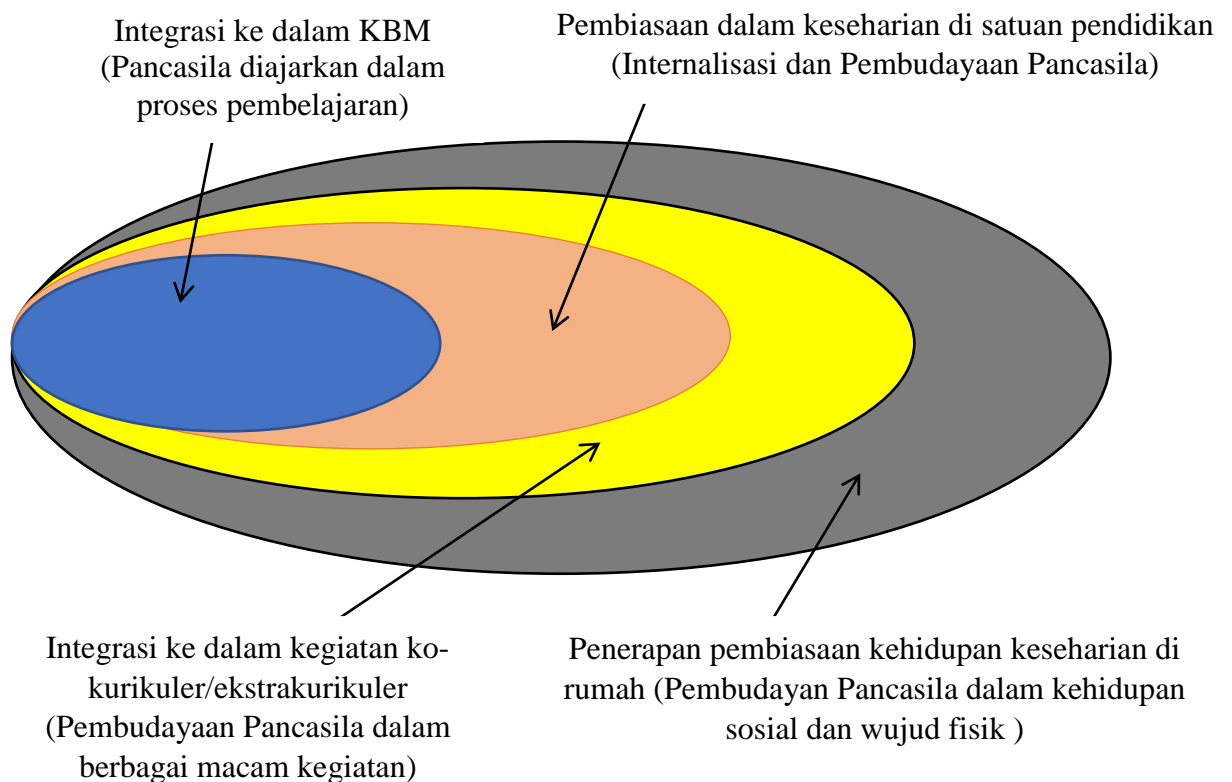
Proses pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sosial budaya secara kongkrit. Dalam hubungan ini realisasi Pancasila dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat secara kongkrit. Nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan situasi, kondisi dan keadaan masyarakat.

b. Pembudayaan Pancasila pada Wujud Budaya Fisik

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam wujud kebudayaan fisik.

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat diketahui pemahaman Pancasila itu tidak hanya sekedar sampai dalam tingkatan pengetahuan saja tetapi sampai pada tingkatan mentalitas dan mampu melakukan sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Salah satu cara pemerintah melakukan proses internalisasi, membentuk kepribadian, sosialisasi, pembudayaan Pancasila melalui proses pendidikan. Diharapkan Pancasila diwariskan kepada generasi muda agar jiwa dan nilai Pancasila tetap tersampaikan kepada generasi ke generasi berikutnya. Mengingat bahwa proses dalam pemahaman hingga tahap mentalitas memerlukan banyak proses dan tahapan, maka harusnya pembelajaran tidak hanya menitikberatkan kepada pengetahuan saja tetapi juga pada aspek keterampilan, dan karakter. Untuk menjadi warga negara

yang baik dan cerdas (*to be smart and good citizen*) setidaknya ada tiga kompetensi warga negara yang harus terpenuhi. Tiga komponen tersebut antara lain pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan. Ketiga kompetensi tersebut dalam proses pembelajaran harus dilakukan secara seimbang dan berkesinambungan untuk membentuk peserta didik yang berkarakter melalui pendidikan. Maka dapat digambarkan literasi Pancasila untuk pendidikan Indonesia yang berkarakter seperti gambar di bawah ini.



Gambar 1. Konteks Mikro Pengembangan Karakter (Budimansyah, 2012: 21)

C. PENUTUP

Pancasila merupakan ideologi dan sebagai sumber dari pedoman hidup baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Kondisi bangsa Indonesia saat ini banyak sekali kasus-kasus yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi, kriminalitas, kenakalan remaja, seks bebas, narkoba, pembunuhan, dan beberapa kasus yang bisa dikatakan menyimpang. Melihat kondisi yang seperti itu, maka pemerintah harusnya menggalakkan kembali literasi Pancasila. Literasi saat ini sudah berkembang maknanya, tidak hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi sudah berkembang menjadi kemampuan menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Ada beberapa tahapan dalam menginternalisasikan nilai Pancasila dalam pribadi diri sendiri, antara lain: pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan kehendak, watak dan hati nurani, strategi dan metode. Setelah mampu menginternalisasikan nilai Pancasila maka akan terwujud pribadi yang sesuai dengan Pancasila. Ada beberapa tahapan untuk membentuk pribadi yang sesuai dengan Pancasila, antara lain: proses penghayatan diawal dengan memiliki tentang pengetahuan yang lengkap, jelas tentang kebaikan dan kebenaran Pancasila; kemudian ditingkatkan ke dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan; kemudian disusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan; kemudian ditingkatkan menjadi mentalitas. Warga negara yang sudah mampu membentuk dirinya sesuai dengan kepribadian Pancasila, maka tahapan selanjutnya adalah sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Pembudayaan Pancasila meliputi, pembudayaan pada kehidupan sosial, pembudayaan pada wujud fisik.

Salah satu cara pemerintah melakukan proses internalisasi, membentuk kepribadian, sosialisasi, pembudayaan Pancasila melalui proses pendidikan. Diharapkan Pancasila diwariskan kepada generasi muda agar jiwa dan nilai Pancasila tetap tersampaikan kepada generasi ke generasi berikutnya. Mengingat bahwa proses dalam pemahaman hingga tahap mentalitas memerlukan banyak proses dan tahapan, maka harusnya pembelajaran tidak hanya menitikberatkan kepada pengetahuan saja tetapi juga pada aspek keterampilan, dan karakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Apandi, I. (2016). *Literasi Pancasila*. (Online). Tersedia di https://www.kompasiana.com/idrisapandi/literasi_pancasila. Diakses pada hari Minggu, 10 Desember 2017. Pukul 14.30 WIB
- Budimansyah, D. (2012). *Perancangan Pembelajaran Berbasis Karakter Seri Pembinaan Profesionalisme Guru*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Dariyo, A. (2013). *Dasar-Dasar Pedagogi Modern*. Jakarta: PT. Indeks.
- IndonesiaStudent.com. (2017). 9 Pengertian Literasi Menurut Para Ahli Lengkap. (Online). Tersedia di <http://www.indonesiastudent.com/pengertian-literasi-menurut-para-ahli/>. Diakses pada hari Minggu, 10 Desember 2017. Pukul 14.45 WIB.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila. Paradigma*: Yogyakarta.
- Megawangi, R. (2004). *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: BPMigas.
- Soedarsono, S. (2010). *Pokok Pokok Pikiran Tentang Konsep Dasar Pendidikan Karakter*. Jakarta: Yayasan Jatidiri Bangsa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winarno. (2012). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Isi, Strategi, dan Penilaian)*. Jakarta: Bumi Aksara.